



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1/MK.7/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Penyampaian Pokok-pokok Materi PMK Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten Tahun Anggaran 2018, Penyampaian Pokok-pokok Materi PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Penyampaian Pokok-pokok Materi PMK Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa dan Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017



tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupatenn Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupatenn Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung



Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 63), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (3) di salurkan apabila persyaratan penyaluran ke RKD telah dipenuhi.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan



- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koordinasi dengan Kepala Desa.
 - (7) Format Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran

berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
4. Ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran



sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%;
(tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan , sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati, kepala KPPN selaku KPA menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan

Mr

Juni tahun anggaran berjalan.

- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran lebih pada RKUN.
5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

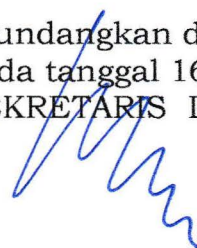
Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 2

TANGGAL : 16 JANUARI 2018

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Dst..... | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Bidang 2.2 | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Dst..... | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Bidang 2.3 | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | Dst..... | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Bidang 2.4 | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Dst..... | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Bidang 2.5 | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana cadangan | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal BUMDesa | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Dst | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah 3.2 | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |
| JML. PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | |
| BENDAHARA DESA | | | | | | | DISETUJUI OLEH : Ds....., TglBln.....Th KEPALA DESA | | | | | |
| (.....) | | | | | | | (.....) | | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN

| NO | U R A I A N |
|----|---|
| 1 | Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa; |
| 2 | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa; |
| 3 | Kolom 3 diisi dengan uraian output; Misal : terlaksananya pembangunan jalan. |
| 4 | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output; Misal : 500 meter |
| 5 | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan; Misal swakelola |
| 6 | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran; |
| 7 | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi; |
| 8 | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi; |
| 9 | <p>Kolom 9 diisi dengan :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan fisik di lapangan dan Foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfermasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah dilaksanakan , sebesar 80% dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% |
| 10 | Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> untuk yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa. |
| 11 | Kolom 13 diisi dengan keterangan Misal : berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas) |

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

Mr S

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 JANUARI 2018

**RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | KECAMATAN | DESA | DANA DESA |
|-----|------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | BOYOLANGU | WAJAK KIDUL | 744,607.000 |
| 002 | BOYOLANGU | SANGGRAHAN | 699,886.000 |
| 003 | BOYOLANGU | PUCUNGKIDUL | 759,580.000 |
| 004 | BOYOLANGU | BOYOLANGU | 731,525.000 |
| 005 | BOYOLANGU | NGRANTI | 698,702.000 |
| 006 | BOYOLANGU | KENDALBULUR | 720,986.000 |
| 007 | BOYOLANGU | BONO | 845,065.000 |
| 008 | BOYOLANGU | WAUNG | 786,501.000 |
| 009 | BOYOLANGU | MOYOKETEN | 692,670.000 |
| 010 | BOYOLANGU | WAJAK LOR | 720,455.000 |
| 011 | BOYOLANGU | KARANGREJO | 771,153.000 |
| 012 | BOYOLANGU | KEPUH | 732,838.000 |
| 013 | BOYOLANGU | TANJUNGSARI | 738,503.000 |
| 014 | BOYOLANGU | SERUT | 746,976.000 |
| 015 | BOYOLANGU | BEJI | 702,236.000 |
| 016 | BOYOLANGU | SOBONTORO | 780,729.000 |
| 017 | BOYOLANGU | GEDANGSEWU | 720,124.000 |
| 018 | KEDUNGWARU | PLOSOKANDANG | 810,280.000 |
| 019 | KEDUNGWARU | TUNGGULSARI | 932,552.000 |
| 020 | KEDUNGWARU | RINGINPITU | 794,905.000 |
| 021 | KEDUNGWARU | LODERESAN | 710,588.000 |
| 022 | KEDUNGWARU | BULUSARI | 742,135.000 |
| 023 | KEDUNGWARU | BANGOAN | 779,422.000 |
| 024 | KEDUNGWARU | BORO | 723,433.000 |
| 025 | KEDUNGWARU | TAPAN | 708,837.000 |
| 026 | KEDUNGWARU | REJOAGUNG | 752,484.000 |
| 027 | KEDUNGWARU | KEDUNGWARU | 691,460.000 |
| 028 | KEDUNGWARU | PLANDAAN | 671,771.000 |
| 029 | KEDUNGWARU | KETANON | 755,477.000 |
| 030 | KEDUNGWARU | TAWANGSARI | 725,880.000 |
| 031 | KEDUNGWARU | MANGUNSARI | 713,743.000 |
| 032 | KEDUNGWARU | WINONG | 694,032.000 |
| 033 | KEDUNGWARU | MAJAN | 876,080.000 |
| 034 | KEDUNGWARU | SIMO | 709,322.000 |
| 035 | KEDUNGWARU | GENDINGAN | 729,085.000 |
| 036 | KEDUNGWARU | NGUJANG | 689,836.000 |
| 037 | NGANTRU | PAKEL | 731,316.000 |
| 038 | NGANTRU | PUCUNGLOR | 741,038.000 |
| 039 | NGANTRU | SRIKATON | 794,036.000 |
| 040 | NGANTRU | PADANGAN | 826,596.000 |
| 041 | NGANTRU | BANJARSARI | 746,214.000 |
| 042 | NGANTRU | PULEREJO | 747,494.000 |
| 043 | NGANTRU | BENDOSARI | 744,219.000 |
| 044 | NGANTRU | NGANTRU | 702,941.000 |
| 045 | NGANTRU | MOJOAGUNG | 737,926.000 |
| 046 | NGANTRU | BATOKAN | 743,345.000 |
| 047 | NGANTRU | KEPUHREJO | 743,397.000 |
| 048 | NGANTRU | POJOK | 793,808.000 |
| 049 | NGANTRU | PINGGIRSARI | 697,631.000 |
| 050 | KAUMAN | BOLOREJO | 741,997.000 |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------|-----------------|---------------|
| 051 | KAUMAN | KAUMAN | 691,803.000 |
| 052 | KAUMAN | BALEREJO | 689,934.000 |
| 053 | KAUMAN | BATANGSAREN | 764,754.000 |
| 054 | KAUMAN | PANGGUNGREJO | 706,594.000 |
| 055 | KAUMAN | KALANGBRET | 684,155.000 |
| 056 | KAUMAN | SIDOREJO | 738,327.000 |
| 057 | KAUMAN | MOJOSARI | 754,489.000 |
| 058 | KAUMAN | KARANGANOM | 767,302.000 |
| 059 | KAUMAN | PUCANGAN | 838,909.000 |
| 060 | KAUMAN | KATES | 924,690.000 |
| 061 | KAUMAN | BANARAN | 754,107.000 |
| 062 | KAUMAN | JATIMULYO | 751,169.000 |
| 063 | PAGERWOJO | WONOREJO | 1,281,056.000 |
| 064 | PAGERWOJO | KEDUNGCANGKRING | 1,018,532.000 |
| 065 | PAGERWOJO | MULYOSARI | 1,153,312.000 |
| 066 | PAGERWOJO | SEGAWA | 1,018,203.000 |
| 067 | PAGERWOJO | SAMAR | 1,121,402.000 |
| 068 | PAGERWOJO | PENJOR | 1,042,590.000 |
| 069 | PAGERWOJO | PAGERWOJO | 706,144.000 |
| 070 | PAGERWOJO | KRADINAN | 1,036,793.000 |
| 071 | PAGERWOJO | SIDOMULYO | 1,174,341.000 |
| 072 | PAGERWOJO | GONDANGGUNUNG | 1,004,998.000 |
| 073 | PAGERWOJO | GAMBIAN | 1,038,650.000 |
| 074 | SENDANG | KEDOYO | 1,241,857.000 |
| 075 | SENDANG | NGLUTUNG | 1,032,157.000 |
| 076 | SENDANG | TALANG | 1,065,940.000 |
| 078 | SENDANG | KROSOK | 877,119.000 |
| 077 | SENDANG | DONO | 845,254.000 |
| 079 | SENDANG | TUGU | 898,821.000 |
| 080 | SENDANG | PICISAN | 929,925.000 |
| 081 | SENDANG | NYAWANGAN | 1,278,416.000 |
| 082 | SENDANG | SENDANG | 792,469.000 |
| 083 | SENDANG | NGLURUP | 1,123,268.000 |
| 084 | SENDANG | GEGER | 1,326,869.000 |
| 085 | KARANGREJO | BUNGUR | 1,020,113.000 |
| 086 | KARANGREJO | BABADAN | 995,615.000 |
| 087 | KARANGREJO | SUKOWIYONO | 726,127.000 |
| 088 | KARANGREJO | SEMBON | 678,556.000 |
| 089 | KARANGREJO | SUKOWIDODO | 712,500.000 |
| 090 | KARANGREJO | TANJUNGSARI | 790,181.000 |
| 091 | KARANGREJO | GEDANGAN | 727,643.000 |
| 092 | KARANGREJO | SUKODONO | 709,019.000 |
| 093 | KARANGREJO | KARANGREJO | 675,243.000 |
| 094 | KARANGREJO | SUKOREJO | 709,842.000 |
| 095 | KARANGREJO | PUNJUL | 866,576.000 |
| 096 | KARANGREJO | JELI | 745,079.000 |
| 097 | KARANGREJO | TULUNGREJO | 805,457.000 |
| 098 | GONDANG | KENDAL | 903,043.000 |
| 099 | GONDANG | TAWING | 715,340.000 |
| 100 | GONDANG | GONDOSULI | 913,689.000 |
| 101 | GONDANG | DUKUH | 700,352.000 |
| 102 | GONDANG | SEPATAN | 725,333.000 |
| 103 | GONDANG | MACANBANG | 755,696.000 |
| 104 | GONDANG | KIPING | 713,814.000 |
| 105 | GONDANG | REJOSARI | 731,535.000 |
| 106 | GONDANG | BENDO | 717,359.000 |
| 107 | GONDANG | NGRENDENG | 685,507.000 |
| 108 | GONDANG | GONDANG | 669,470.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------|-------------------|---------------|
| 109 | GONDANG | BENDUNGAN | 679,008.000 |
| 110 | GONDANG | NOTOREJO | 744,419.000 |
| 111 | GONDANG | SIDEM | 1,022,721.000 |
| 112 | GONDANG | SIDOMULYO | 915,773.000 |
| 113 | GONDANG | BLENDIS | 929,315.000 |
| 114 | GONDANG | MOJOARUM | 748,932.000 |
| 115 | GONDANG | TIUDAN | 887,255.000 |
| 116 | GONDANG | JARAKAN | 687,095.000 |
| 117 | GONDANG | WONOKROMO | 712,992.000 |
| 118 | SUMBERGEMPOL | SAMBIDOPLANG | 727,316.000 |
| 119 | SUMBERGEMPOL | WATES | 729,857.000 |
| 120 | SUMBERGEMPOL | MIRIGAMBAR | 783,817.000 |
| 121 | SUMBERGEMPOL | TRENCENG | 714,792.000 |
| 122 | SUMBERGEMPOL | BENDILWUNGU | 695,098.000 |
| 123 | SUMBERGEMPOL | SAMBIJAJAR | 726,968.000 |
| 124 | SUMBERGEMPOL | PODOREJO | 768,084.000 |
| 125 | SUMBERGEMPOL | DOROAMPEL | 758,307.000 |
| 126 | SUMBERGEMPOL | JUNJUNG | 776,589.000 |
| 127 | SUMBERGEMPOL | TAMBAKREJO | 731,581.000 |
| 128 | SUMBERGEMPOL | WONOREJO | 795,292.000 |
| 129 | SUMBERGEMPOL | BENDILJATI KULON | 755,557.000 |
| 130 | SUMBERGEMPOL | BENDILJATI WETAN | 708,649.000 |
| 131 | SUMBERGEMPOL | SUMBERDADI | 754,931.000 |
| 132 | SUMBERGEMPOL | JABALSARI | 789,530.000 |
| 133 | SUMBERGEMPOL | SAMBIROBYONG | 785,835.000 |
| 134 | SUMBERGEMPOL | BUKUR | 918,202.000 |
| 135 | NGUNUT | KARANGSONO | 695,630.000 |
| 136 | NGUNUT | SAMIR | 709,916.000 |
| 137 | NGUNUT | KACANGAN | 716,123.000 |
| 138 | NGUNUT | SELOREJO | 699,295.000 |
| 139 | NGUNUT | BALESONO | 718,165.000 |
| 140 | NGUNUT | PANDANSARI | 744,064.000 |
| 141 | NGUNUT | SUMBERINGIN KULON | 687,182.000 |
| 142 | NGUNUT | SUMBERINGIN KIDUL | 726,133.000 |
| 143 | NGUNUT | KALIWUNGU | 698,446.000 |
| 144 | NGUNUT | SUMBEREJO WETAN | 721,208.000 |
| 145 | NGUNUT | NGUNUT | 824,628.000 |
| 146 | NGUNUT | KALANGAN | 701,616.000 |
| 147 | NGUNUT | GILANG | 753,151.000 |
| 148 | NGUNUT | SUMBEREJO KULON | 758,227.000 |
| 149 | NGUNUT | PURWOREJO | 768,952.000 |
| 150 | NGUNUT | KROMASAN | 713,949.000 |
| 151 | NGUNUT | PULOSARI | 748,376.000 |
| 152 | NGUNUT | PULOTONDO | 722,239.000 |
| 153 | PUCANGLABAN | PUCANGLABAN | 867,310.000 |
| 154 | PUCANGLABAN | KALIDawe | 996,348.000 |
| 155 | PUCANGLABAN | PANGGUNGKALAK | 927,397.000 |
| 156 | PUCANGLABAN | KALIGENTONG | 747,166.000 |
| 157 | PUCANGLABAN | SUMBERBENDO | 1,014,019.000 |
| 158 | PUCANGLABAN | MANDING | 964,280.000 |
| 159 | PUCANGLABAN | PANGGUNGUNI | 772,248.000 |
| 160 | PUCANGLABAN | SUMBERDADAP | 787,052.000 |
| 161 | PUCANGLABAN | DEMUK | 917,231.000 |
| 162 | REJOTANGAN | TENGUR | 793,094.000 |
| 163 | REJOTANGAN | PANJEREJO | 741,509.000 |
| 164 | REJOTANGAN | KARANGSARI | 955,434.000 |
| 165 | REJOTANGAN | TUGU | 776,172.000 |
| 166 | REJOTANGAN | SUKOREJO WETAN | 813,531.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| 167 | REJOTANGAN | JATIDOWO | 687,921.000 |
| 168 | REJOTANGAN | BANJAREJO | 745,148.000 |
| 169 | REJOTANGAN | TANEN | 770,133.000 |
| 170 | REJOTANGAN | SUMBERAGUNG | 899,496.000 |
| 171 | REJOTANGAN | BLIMBING | 746,418.000 |
| 172 | REJOTANGAN | REJOTANGAN | 793,230.000 |
| 173 | REJOTANGAN | PAKISREJO | 705,975.000 |
| 174 | REJOTANGAN | TEGALREJO | 745,434.000 |
| 175 | REJOTANGAN | ARIYOJEDING | 786,073.000 |
| 176 | REJOTANGAN | TENGGO | 739,072.000 |
| 177 | REJOTANGAN | BUNTARAN | 737,679.000 |
| 178 | KALIDAWIR | KALIBATUR | 1,057,869.000 |
| 179 | KALIDAWIR | REJOSARI | 1,054,956.000 |
| 180 | KALIDAWIR | SUKOREJO KULON | 742,535.000 |
| 181 | KALIDAWIR | KALIDAWIR | 749,891.000 |
| 182 | KALIDAWIR | KARANGTALUN | 771,139.000 |
| 183 | KALIDAWIR | BANYU URIP | 941,718.000 |
| 184 | KALIDAWIR | WINONG | 1,004,977.000 |
| 185 | KALIDAWIR | JOHO | 981,027.000 |
| 186 | KALIDAWIR | PAKISAJI | 722,032.000 |
| 187 | KALIDAWIR | JABON | 754,852.000 |
| 188 | KALIDAWIR | TUNGGANGRI | 688,234.000 |
| 189 | KALIDAWIR | SALAKKEMBANG | 738,116.000 |
| 190 | KALIDAWIR | NGUBALAN | 745,680.000 |
| 191 | KALIDAWIR | DOMASAN | 711,854.000 |
| 192 | KALIDAWIR | TANJUNG | 716,985.000 |
| 193 | KALIDAWIR | BETAK | 1,107,539.000 |
| 194 | KALIDAWIR | PAGERSARI | 988,682.000 |
| 195 | BESUKI | BESOLE | 834,094.000 |
| 196 | BESUKI | TANGGULWELAHAN | 723,628.000 |
| 197 | BESUKI | BESUKI | 769,753.000 |
| 198 | BESUKI | KEBOIRENG | 923,950.000 |
| 199 | BESUKI | TANGGULTURUS | 747,101.000 |
| 200 | BESUKI | SEDAYUGUNUNG | 883,766.000 |
| 201 | BESUKI | TANGGULKUNDUNG | 798,741.000 |
| 202 | BESUKI | WATES KROYO | 687,924.000 |
| 203 | BESUKI | SIYOTOBAGUS | 726,760.000 |
| 204 | BESUKI | TULUNGREJO | 709,285.000 |
| 205 | CAMPURDARAT | NGENTRONG | 802,836.000 |
| 206 | CAMPURDARAT | GEDANGAN | 705,465.000 |
| 207 | CAMPURDARAT | SAWO | 748,992.000 |
| 208 | CAMPURDARAT | GAMPING | 748,321.000 |
| 209 | CAMPURDARAT | CAMPURDARAT | 802,084.000 |
| 210 | CAMPURDARAT | WATES | 998,619.000 |
| 211 | CAMPURDARAT | PELEM | 894,983.000 |
| 212 | CAMPURDARAT | POJOK | 818,184.000 |
| 213 | CAMPURDARAT | TANGGUNG | 826,451.000 |
| 214 | BANDUNG | NGLAMPIR | 784,454.000 |
| 215 | BANDUNG | TALUN KULON | 819,977.000 |
| 216 | BANDUNG | BANTENGAN | 920,666.000 |
| 217 | BANDUNG | KEDUNGWILUT | 697,604.000 |
| 218 | BANDUNG | SUWARU | 692,542.000 |
| 219 | BANDUNG | NGUNGGAHAN | 917,124.000 |
| 220 | BANDUNG | SURUHAN KIDUL | 679,258.000 |
| 221 | BANDUNG | BANDUNG | 674,414.000 |
| 222 | BANDUNG | MERGAYU | 708,395.000 |
| 223 | BANDUNG | SEBALOR | 737,283.000 |
| 224 | BANDUNG | SUKOHARJO | 965,293.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 225 | BANDUNG | SOKO | 729,073.000 |
| 226 | BANDUNG | SINGGIT | 688,257.000 |
| 227 | BANDUNG | NGEPEH | 900,197.000 |
| 228 | BANDUNG | SURUHAN LOR | 725,920.000 |
| 229 | BANDUNG | BULUS | 718,236.000 |
| 230 | BANDUNG | KESAMBI | 919,026.000 |
| 231 | BANDUNG | GANDONG | 729,186.000 |
| 232 | PAKEL | SAMBITAN | 715,439.000 |
| 233 | PAKEL | BONO | 735,270.000 |
| 234 | PAKEL | SUKOANYAR | 753,357.000 |
| 235 | PAKEL | DUWET | 740,843.000 |
| 236 | PAKEL | TAMBAN | 783,703.000 |
| 237 | PAKEL | NGEBONG | 694,812.000 |
| 238 | PAKEL | SODO | 715,623.000 |
| 239 | PAKEL | GOMBANG | 760,866.000 |
| 240 | PAKEL | PAKEL | 684,087.000 |
| 241 | PAKEL | SUWALUH | 742,979.000 |
| 242 | PAKEL | PECUK | 684,109.000 |
| 243 | PAKEL | BANGUNMULYO | 754,996.000 |
| 244 | PAKEL | KASREMAN | 696,162.000 |
| 245 | PAKEL | SANAN | 908,070.000 |
| 246 | PAKEL | BANGUNJAYA | 725,968.000 |
| 247 | PAKEL | NGRANCE | 734,719.000 |
| 248 | PAKEL | GEBANG | 712,705.000 |
| 249 | PAKEL | GESIKAN | 937,643.000 |
| 250 | PAKEL | GEMPOLAN | 723,246.000 |
| 251 | TANGGUNGUNUNG | KRESIKAN | 1,059,911.000 |
| 252 | TANGGUNGUNUNG | JENGLUNGHARJO | 952,650.000 |
| 253 | TANGGUNGUNUNG | NGREJO | 1,021,705.000 |
| 254 | TANGGUNGUNUNG | TANGGUNG GUNUNG | 890,074.000 |
| 255 | TANGGUNGUNUNG | NGEPOH | 836,044.000 |
| 256 | TANGGUNGUNUNG | TENGGAJEJO | 816,430.000 |
| 257 | TANGGUNGUNUNG | PAKISREJO | 987,150.000 |
| JUMLAH | | | 205.952.328.000 |

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

